

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

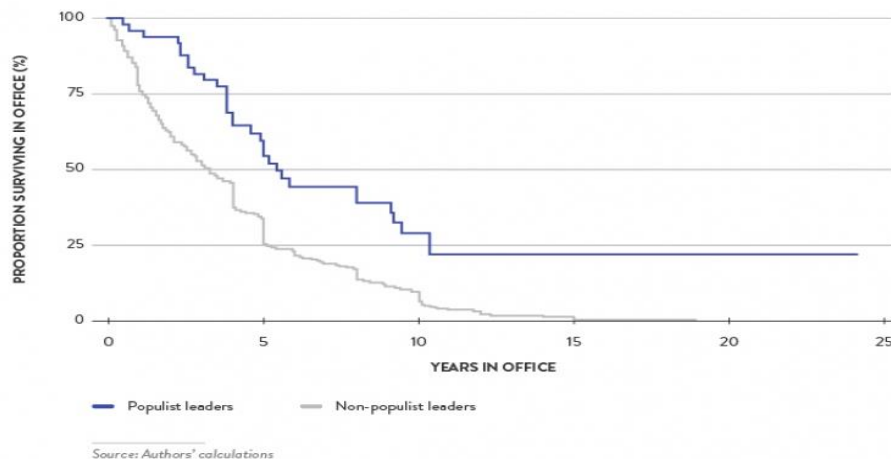
Dewasa ini, populisme sudah merupakan pendekatan yang tidak asing lagi bagi sistem pemerintahan global. Pemikiran ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Eropa, Amerika Utara maupun Latin, dan bahkan sudah sampai ke dalam kawasan Asia Tenggara. Populisme seringkali dianggap oleh banyak ahli politik sebagai salah satu tantangan utama terhadap demokrasi, sehingga otomatis juga akan memberikan pengaruh terhadap pembentukan kebijakan dalam maupun luar negeri suatu negara. Menurut artikel ilmiah dari *Tony Blair Institute for Global Change*, populisme mempengaruhi demokrasi dengan cara berikut:

Populist leaders often claim that they are exclusively beholden to the will of the people, making it legitimate for them to override legal or constitutional constraints on their power. This basic claim can take very different forms. Left-wing populists tend to argue that the existing legal order only sustains the wealth and power of elites. Right-wing populists maintain that the existing rules and norms of democracy entrench the interests of snooty intellectuals or civil servants and convey illegitimate advantages on ethnic or religious outsiders. What both sets of claims have in common is that they empower populist governments to undermine checks on their authority, such as an independent judiciary.¹

¹ Jordan Kyle dan Yascha Mounk. 2018. "The Populist Harm to Democracy: An Empirical Assessment." Institute for Global Change. December 26. <https://institute.global/policy/populist-harm-democracy-empirical-assessment#article-footnote-28>.

Dari pernyataan tersebut, para penulis artikel mengatakan bahwa para pemimpin populis memiliki hak untuk semena-mena terhadap hukum dan undang-undang yang ada sebab mereka mengaku sebagai bentuk manifestasi dari keinginan masyarakat. Dalam kata lain, populis dapat mengurangi sistem *check and balances* politik negara, khususnya di bagian eksekutif. Efek lain yang ditekankan oleh mereka adalah juga bagaimana populis karena seringkali dihubungkan dengan kekuasaan otoriter, adalah bagaimana pemimpin populis cenderung untuk bertahan lebih lama dalam kekuasaan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hal tersebut:

1.1.1 Pertahanan Pemimpin Populis Melawan Non-populis di Kantor Kekuasaan



Sumber: “Tony Blair Institute for Global Change”, Jordan Kyle dan Limor Gultchin, “Populists in Power Around the World,” last modified November 7, 2018, diakses November 25, 2020, <https://institute.global/policy/populists-power-around-world>.

Tabel tersebut menunjukkan bagaimana pemimpin populis cenderung memiliki masa jabatan yang lebih panjang dibandingkan dengan pemimpin non-populis di

kursi kekuasaan. Hal ini menjadi signifikan karena tanda paling mendasar dari demokrasi liberal adalah apakah para pemimpin menghormati hasil pemilu dan, ketika kalah, apakah mereka meninggalkan jabatan melalui pemilihan yang bebas dan adil.² Namun, data yang disajikan membuktikan bahwa kenyataan berbeda dengan sentiment tersebut.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, populisme merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi dalam kawasan Asia Tenggara, dimana pendekatan ini sudah lama merambat dalam sistem politik negara-negara seperti Filipina, Thailand, Myanmar, dan khususnya Indonesia. Banyak pemimpin dari negara tersebut menggunakan strategi populis untuk meyakinkan posisinya sebagai kepala negara, termasuk Rodrigo Duterte, Thaksin Sinawarta, Aung San Suu Kyi, dan Joko Widodo. Alasan utama mengapa ide populisme di negara-negara tersebut sangat lazim adalah karena kesamaan budaya politik mereka yang cenderung sangat berpegang terhadap satu individu yang terkesan kuat. Selain itu, menurut ahli populisme Asia Tenggara Joshua Kurlantzick, Partai politik yang ada di Asia Tenggara seringkali didominasi oleh klientelisme dan neopatrimonialisme, di mana partai dikendalikan oleh satu tokoh atau keluarga.³ Lemahnya partai politik tersebut yang kemudian mengakibatkan mudahnya seorang populis untuk bekembang, dimana mereka mendominasi partai tersebut, dimana kemudian mereka menang dan mengendalikan

² Gultchin dan Kyle. 2020.

³ Joshua Kurlantzick. 2020. "Southeast Asia's Populism Is Different but Also Dangerous." Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations. Diakses February 23. <https://www.cfr.org/in-brief/southeast-asias-populism-different-also-dangerous>.

lembaga-lembaga negara. Sama seperti di kawasan lain, para pemimpin populis di Asia Tenggara juga menggunakan strategi yang serupa, memposisikan diri mereka sebagai orang luar yang bisa menyelesaikan masalah di mana para elit negara telah gagal, menawarkan pendekatan brutal terhadap kejahatan negara, dan menargetkan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.⁴

Walau populisme adalah pendekatan politik yang sudah menyebar di perpolitikan global, namun populisme di Asia Tenggara berbeda dalam banyak hal dibandingkan di negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Populisme di negara-negara kawasan barat banyak berfokus pada imigrasi, penurunan ekonomi, dan perdagangan, tetapi populisme di Asia Tenggara cenderung fokus terhadap perbedaan agama dan etnis, melawan perdagangan narkoba, dan menarik dukungan masyarakat kelas pekerja dan kelas menengah ke bawah. Menurut Richard Javad Heydarian, ahli populisme Duterte, dampak kelas menengah adalah sebagai berikut:

“The appeal of populists and strongmen in these countries lies in their uncanny ability to tap into collective frustrations—most especially among aspirational middle classes—over the inefficacy of state institutions to accommodate new voices and provide basic goods and services.”⁵

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para kaum menengah ke bawah banyak yang menjadi frustrasi dengan sistem demokrasi karena mereka percaya para tokoh politik demokrasi tidak berhasil dalam menangani ketidaksetaraan

⁴ Alfred.Mccoy (2017). “Philippine Populism: Local Violence and Global Context in the Rise of a Filipino Strongman,” in, "Surveillance & Society' 15, nos. 3/4 (2017), pp. 514-22.. Surveillance & Society. 15. 514-522. 10.24908/ss.v15i3/4.6638.

⁵ Richard Javad. Heydarian 2019. “Opinion | Understanding Duterte's Mind-Boggling Rise to Power.” The Washington Post. WP Company. April 1.
<https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/03/20/duterte/>.

dan kejahatan, serta tidak memberikan layanan negara yang efektif. Kaum kelas menengah dan pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik Asia Tenggara, sebab mereka yang menjadi mayoritas dalam masyarakat, yang berarti mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang sistem politik negara, seperti apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang berhasil menurunkan kekuasaan Presiden Soeharto.⁶ Selain itu, setelah menjabat, pemimpin populis Asia Tenggara seringkali melepehkan institusi demokrasi, berhubung di negara-negara tersebut partai politik belum menjadi suri teladan dalam pemerintahan yang demokratis.

Populisme, walau seringkali diasosiasikan dengan nasionalisme dan isolasionisme, dapat juga melampaui batas negara melalui kebijakan luar negeri. Munculnya populisme itu sendiri banyak dianggap oleh para ahli sebagai bentuk reaksi negara terhadap krisis-krisis politik yang sering disebabkan oleh globalisasi dan pergantian posisi di politik internasional.⁷ Para pemimpin populis yang menjabat menganggap kebijakan luar negeri sebagai kelanjutan dari politik domestik negara. Mereka banyak yang mengaku diri mereka sebagai satu-satunya wakil rakyat yang sebenarnya, sehingga kebijakan luar negeri populis sangatlah mengutamakan tuntutan rakyat dan kepentingan negara, dibandingkan proses-proses yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan global. Pemimpin populis juga mengedepankan kebijakan luar

⁶ Eve Warburton dan Edward Aspinall. "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion." *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 2 (2019): 255-85. Diakses April 19, 2020. doi:10.2307/26798854.

⁷ Angelos Chryssogelos. "Populism in Foreign Policy." *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. 27 Jul. 2017; Accessed 13 Sep. 2020. <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-467>.

negeri yang bersifat menguntungkan negara mereka. Seperti dalam kasus perdagangan, pemimpin populis banyak dianggap akan mengeluarkan kebijakan yang cenderung proteksionis, namun mereka tidak akan keberatan untuk membuat suatu perjanjian dengan negara lain jikalau perjanjian tersebut selaras dengan kepentingan nasional mereka. Dapat disimpulkan karena kebijakan luar negeri berhubungan langsung dengan kebijakan dalam negeri, maka suatu negara yang berada dibawah pemimpin populis tentu akan memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda dari pemimpin lainnya.

Indonesia pun tidak lepas dari kecendrungan populisme tersebut. Rasa kekecewaan rakyat terhadap demokrasi selama bertahun-tahun ini telah menyulut kemarahan populis, yang telah terwujud dalam bentuk ketidakpuasan yang tumbuh terhadap kalangan mapan dan elit; meningkatnya konservatisme dan intoleransi Islam; dan nasionalisme ekonomi.⁸ Oleh sebab itu, muncul seorang tokoh yang kemudian menjadi presiden Indonesia yang seringkali dianggap sebagai pemimpin populis, yakni Presiden Joko Widodo atau yang dikenal dengan sebutan “Jokowi”. Jokowi memulai karir politiknya sebagai Walikota Surakarta, kemudian Gubernur DKI Jakarta sebelum kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh. Berbeda dengan para pemimpin populis lainnya, yang menggunakan strategi seperti menyerang sistem perpolitikan yang ada dan menyerang perusahaan-perusahaan asing karena dianggap mengambil uang rakyat, Jokowi muncul dengan

⁸ Alexander R. Arifianto, “Indonesia's Democratic Discontent,” – The Diplomat (for The Diplomat, February 28, 2019), last modified February 28, 2019, accessed November 25, 2020, <https://thediplomat.com/2019/02/indonesias-democratic-discontent/>.

memperkenalkan suatu bentuk populisme yang baru. Jokowi disebut memiliki bentuk populis yang bersifat teknokratis dan intra-sistemik. Hal tersebut terlihat bagaimana beliau tidak pernah sekalipun menyalahkan sistem politik yang ada di Indonesia, namun berjanji untuk memperbaikinya dari dalam. Sang presiden juga tidak menyalahkan pihak perusahaan manapun, bahkan bersifat sangat inklusif, serta tidak juga anti-asing. Namun di waktu yang sama, ia sangat mengedepankan citranya sebagai salah satu “orang biasa” dalam masyarakat Indonesia.⁹ Bentuk populisme yang secara signifikan cukup berbeda ini tentu membedakan pemerintahan beliau dibandingkan dengan para presiden Republik Indonesia yang sebelumnya, khususnya dalam segi kebijakan luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari data-data yang disajikan dalam latar belakang tersebut mengenai topik yang akan dibahas, di dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan apa saja yang menjadi kebijakan populisme Joko Widodo yang memiliki implikasi terhadap kebijakan luar negeri pada Indonesia. Penulis juga berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan populisme tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri Joko Widodo. Berikut adalah dua rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini:

⁹ Marcus Mietzner, “Jokowi: Rise of a Polite Populist,” Inside Indonesia, last modified April 27, 2014, accessed November 25, 2020, <https://www.insideindonesia.org/jokowi-rise-of-a-polite-populist>.

1. Apa saja kebijakan populisme Joko Widodo yang memiliki implikasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan populisme tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri Joko Widodo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi apa saja kebijakan Presiden Joko Widodo yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang mengandung unsur populisme, yang di waktu yang sama juga memiliki implikasi terhadap kebijakan luar negeri Republik Indonesia itu sendiri. Penelitian ini kemudian juga berujuan untuk menjelaskan bagaimana proses kebijakan populis tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri Joko Widodo itu sendiri. Tujuan penelitian ini dapat dirangkum menjadi:

1. Mengidentifikasi semua kebijakan populis Joko Widodo yang memiliki implikasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.
2. Menjelaskan proses bagaimana kebijakan populisme tersebut mempengaruhi kebijakan luar negeri Joko Widodo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai fenomena populisme itu sendiri serta pengaruhnya terhadap kebijakan negara

Republik Indonesia di masa jabatan Presiden Joko Widodo, khususnya terhadap kebijakan luar negeri beliau. Melalui data-data yang disajikan, para pembaca dapat mengerti secara jelas bagaimana populisme itu sendiri dapat mempengaruhi suatu kebijakan seorang aktor pemimpin negara pada masa pemerintahannya. Penelitian ini juga dapat berkontribusi bagi analisis pihak sarjana atau badan riset resmi lainnya sehingga dapat membantu dalam proses pembuatan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik penelitian skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang telah dibagi menjadi lima bagian. Bagian-bagian tersebut terdiri dari:

BAB I : Bab ini akan berisi latar belakang masalah dari penelitian serta tema dan topik yang akan menjadi inti dari pembahasan penelitian ini. Penulis mengajukan dua rumusan masalah yang menjadi titik acuan dalam membahas topik penelitian ini. Bab ini juga berisi tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab ini, penulis memaparkan kerangka berpikir yang terdiri dari tinjauan pustaka tentang studi terdahulu dengan topik yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Bab ini kemudian juga akan berisi tentang tinjauan teori dan pembahasan yang terkait dengan topic penelitian yang kemudian menjadi alat penulis dalam membuat pada bagian pembahasan.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Penulis memilih pendekatan-pendekatan penelitian tersebut, yaitu: pendekatan kualitatif, metode penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi tentang pembahasan dari dua rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis di bab 1. Penulis akan menunjukkan semua kebijakan-kebijakan Jokowi yang bersifat populis dan kemudian akan memilih dari kebijakan itu yang memiliki implikasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang terus akan dihubungkan. Setelah mengetahui kebijakan luar negeri Jokowi yang populis, penulis akan kemudian menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut secara langsung mempengaruhi kebijakan luar negeri Joko Widodo itu sendiri.

BAB V : Bab ini akan berisi tentang kesimpulan yang meliputi semua pembahasan pada bagian sebelumnya.

